IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

Siddiq Raihan Devano
NPP. 33.0044
Program Studi Kebijakan Publik
Email: raihansiddiq1701@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Selvia Junita Praja, S.IP, M.Si.
Email: selvia@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The research problem stems from the low coverage of active participants in the BPJS Ketenagakerjaan, the predominance of workers in the informal sector, and the geographical conditions of Simeulue as an archipelago, which affect access to services and the effectiveness of policy implementation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the factors supporting and hindering the implementation of policies regarding the provision of employment social security in Simeulue Regency, Aceh Province.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach within a postpositivist paradigm. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed using Template Analysis with the assistance of NVivo 12, based on the six dimensions of policy implementation identified by Knill and Tosun: choice of policy instruments, policy design, oversight structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance.* ***Result:*** *The research findings indicate that the implementation of employment social security policies in Simeulue Regency has not been optimal. Factors supporting implementation include the commitment of officials, effective face-to-face outreach, inter-agency coordination, support from the local government, and evidence of claim benefits that boost public trust. Meanwhile, inhibiting factors include the geographical challenges of an archipelago, limited use of digital tools, administrative procedures that are not easily understood by informal workers, weak field evaluations, limited human resources and service infrastructure, and the low ability of informal workers to pay contributions consistently.* ***Conclusion:*** *This study concludes that implementation needs to be strengthened through the simplification of service procedures, improved field supervision, the empowerment of villages as a base for data collection and outreach, and the development of a more flexible contribution scheme for informal workers.*
Keywords: *BPJS Employment, Employment Social Security, Island, Policy Implementation, Workers*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh rendahnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, dominasi pekerja sektor informal, serta kondisi geografis Simeulue sebagai wilayah kepulauan yang memengaruhi akses layanan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivisme. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Template Analysis dengan bantuan NVivo 12 berdasarkan enam

dimensi implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue belum berjalan optimal. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya komitmen petugas, sosialisasi tatap muka yang efektif, koordinasi lintas lembaga, dukungan pemerintah daerah, serta bukti manfaat klaim yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi hambatan geografis kepulauan, keterbatasan penggunaan instrumen digital, prosedur administrasi yang belum mudah dipahami pekerja informal, lemahnya evaluasi lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur layanan, serta rendahnya kemampuan pekerja informal dalam membayar iuran secara berkelanjutan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi perlu dilakukan melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan pengawasan lapangan, pemberdayaan desa sebagai basis pendataan dan sosialisasi, serta pengembangan skema iuran yang lebih fleksibel bagi pekerja informal.
Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Implementasi Kebijakan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kepulauan, Tenaga Kerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan sosial terhadap tenaga kerja merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kesejahteraan negara. Sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan sosial ketenagakerjaan berperan memastikan pekerja memperoleh perlindungan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari hak dasar kemanusiaan (Putra et al., 2025). Keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan normatif sebagai wujud keadilan sosial bagi tenaga kerja. Pandangan ini sejalan dengan konsep perluasan perlindungan sosial yang menekankan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen penting untuk mengurangi kerentanan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Van Ginneken, 2013).

Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Cakupan perlindungan diberikan kepada kategori peserta yang berbeda, yaitu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (BPJS Ketenagakerjaan, 2025). Perbedaan skema perlindungan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan manfaat dengan karakteristik masing-masing kelompok pekerja. Implementasi sistem jaminan sosial juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media agar tujuan perlindungan sosial dapat tercapai secara optimal (Fitriati, Rahmayanti, & Salomo, 2012). Kecelakaan kerja menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa kecelakaan kerja merupakan risiko yang harus dijamin melalui perlindungan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap risiko kerja menjadi bagian penting dalam sistem jaminan sosial karena mampu menjaga keberlangsungan pendapatan pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko sosial maupun ekonomi (Van Ginneken, 2013).

Data nasional tahun 2024 menunjukkan terdapat 462.241 kasus kecelakaan kerja dengan nilai klaim mencapai Rp3,49 triliun. Sebanyak 423.644 kasus (91,65%) terjadi pada peserta Penerima Upah (PU), 34.364 kasus (7,43%) pada Bukan Penerima Upah (BPU), dan 4.233 kasus (0,92%) pada sektor jasa konstruksi (Kementerian Ketenagakerjaan & BPJS Ketenagakerjaan, 2025). Tingginya angka

tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja masih menjadi persoalan penting dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Besarnya nilai klaim juga menunjukkan fungsi jaminan sosial sebagai mekanisme perlindungan keuangan yang mampu mengurangi beban ekonomi pekerja dan keluarganya saat menghadapi risiko kerja (Yusuf et al., 2020).

Pada tahun 2023, Provinsi Aceh mencatat 896 kasus kecelakaan kerja, sedangkan Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 mencatat 433 kasus dengan nilai klaim JKK sekitar Rp6 miliar. Meskipun jumlah kasus relatif lebih rendah dibandingkan daerah industri besar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja di Simeulue tetap memerlukan perhatian khusus, terutama pada sektor-sektor berisiko seperti pertanian, perikanan, konstruksi, dan transportasi. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 48 Tahun 2024 mengatur bahwa JKK merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Regulasi tersebut juga mengatur kategori peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup pekerja penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, dan pekerja sosial keagamaan (PERBUP, 2024). Kehadiran regulasi daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial hingga tingkat lokal.

Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue tahun 2023–2025 menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja dari 25.977 menjadi 26.748 orang. Namun, jumlah peserta aktif justru menurun menjadi 6.359 orang pada tahun 2025 dengan cakupan kepesertaan aktif hanya 23,86% (BPJS Ketenagakerjaan, 2025). Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat perlindungan tenaga kerja. Penurunan kepesertaan dipengaruhi oleh keterbatasan modal usaha, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dominasi sektor informal, serta keterbatasan akses layanan. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Meilarovasari, Miarsa, dan Yahya (2025) yang menjelaskan bahwa pekerja informal masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan sosial, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun keberlanjutan pembayaran iuran.

Dominasi pekerja sektor informal masih terlihat baik secara nasional maupun di Kabupaten Simeulue. Tingginya proporsi pekerja informal disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta fleksibilitas sektor informal yang lebih mudah diakses. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam perluasan cakupan jaminan sosial karena kelompok pekerja informal cenderung lebih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi serta memiliki tingkat kepesertaan yang lebih rendah dibanding pekerja formal (Meilarovasari et al., 2025). Pada tahun 2025, total pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue mencapai Rp2,91 miliar untuk 317 pekerja. Program JHT mencatat klaim tertinggi sebanyak 226 kasus dengan nilai Rp2,08 miliar, sedangkan program Jaminan Pensiun hanya 3 kasus senilai Rp33 juta (BPJS Ketenagakerjaan, 2025). Rendahnya partisipasi pada program pensiun menunjukkan masih terbatasnya kesadaran pekerja terhadap manfaat perlindungan jangka panjang. Padahal, sistem pensiun memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat pada usia lanjut dan mengurangi risiko kemiskinan setelah tidak lagi produktif bekerja (Barr & Diamond, 2009).

Rendahnya keterlibatan pekerja formal dan informal serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sparrow, Suryahadi, dan Widyanti (2013) yang menyatakan bahwa efektivitas program jaminan sosial sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, aksesibilitas program, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan. Meskipun kemitraan antara BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pihak telah terbentuk, sosialisasi kepada pekerja informal masih belum optimal sehingga kepatuhan pembayaran iuran cenderung menurun (Putra Prihananto, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas administrasi, perluasan akses layanan, serta pengembangan strategi perlindungan yang lebih adaptif agar tujuan

perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat tercapai secara menyeluruh. (Pristanti, Sukidin, & Hartanto, 2022)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berdasarkan penelitian, penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh rendahnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue, khususnya pada pekerja sektor informal. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan program perlindungan tenaga kerja, data menunjukkan bahwa dari 26.748 tenaga kerja pada tahun 2025 hanya 6.359 pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif atau sekitar 23,86% dari total tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang menargetkan perlindungan sosial secara menyeluruh (universal coverage) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan akses layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dominasi pekerja informal menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Adapun kesenjangan penelitian (research gap) yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa sebagian besar penelitian terdahulu mengenai BPJS Ketenagakerjaan lebih berfokus pada aspek kepesertaan, manfaat program, atau implementasi secara umum di wilayah perkotaan dan sektor formal. Sementara itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Knill dan Tosun pada daerah kepulauan dengan dominasi pekerja informal seperti Kabupaten Simeulue. Penelitian sebelumnya juga belum banyak mengidentifikasi secara komprehensif faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kapasitas administrasi daerah, struktur pengawasan, serta penerimaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan serta mengkaji upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue masih rendah, yakni hanya mencapai 23,86% dari total tenaga kerja, sementara mayoritas pekerja berada pada sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian pendapatan. Kondisi geografis Simeulue sebagai wilayah kepulauan juga menimbulkan berbagai kendala dalam akses layanan, sosialisasi, pengawasan, dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Apabila kondisi ini tidak segera diteliti dan ditindaklanjuti, maka masih banyak pekerja yang belum memperoleh perlindungan sosial secara memadai, tujuan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan sulit tercapai, serta potensi meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pekerja akan semakin besar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dan BPJS Ketenagakerjaan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal di wilayah kepulauan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan sosial di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Afmi Apriliani dan Venni Alfrianni Bawamenewi (2024) mengenai implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah

rendahnya pemahaman perusahaan terhadap prosedur dan persyaratan administrasi yang diperlukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak pelaksana melakukan berbagai langkah strategis seperti pendampingan dan pengingat kepada perusahaan peserta agar melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, Utama (2023) dalam penelitiannya mengenai pelayanan penanganan kemiskinan, perlindungan, dan jaminan sosial melalui program BPJS Gratis di Kota Mataram menemukan bahwa keberhasilan pelayanan jaminan sosial sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat penerima manfaat. Selain itu, Gatinangsih (2017) menjelaskan bahwa aspek kependudukan dan ketenagakerjaan memiliki hubungan erat dengan perlindungan sosial karena jaminan sosial merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mengurangi kerentanan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Elvi Nuari Hutahaean (2023) mengenai implementasi kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan menemukan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup baik berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, meskipun belum sepenuhnya optimal karena sosialisasi kepada masyarakat masih belum merata. Penelitian Wenny Hazminovia Siregar dan Rudi Kristian (2023) mengenai pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Pasar Sambas Kota Medan juga menunjukkan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan belum terlaksana secara maksimal akibat rendahnya kepesertaan dan kesadaran pekerja. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nuurjannah (2021) yang mengkaji implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, kepatuhan pelaksana, dan koordinasi antarorganisasi. Sementara itu, Lelono dan Rahmadanita (2023) menemukan bahwa implementasi kebijakan BPJS pada pelayanan pasien rawat jalan masih menghadapi berbagai kendala administratif dan pelayanan yang memerlukan peningkatan kualitas koordinasi serta pemahaman masyarakat terhadap manfaat program.

Selanjutnya, penelitian Annisa Farras Tsabitah dan Siti Hajati Hoesin (2024) tentang perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pekerja informal disebabkan oleh keterbatasan usia kepesertaan dan minimnya pemahaman mengenai manfaat jaminan sosial. Penelitian Fakhri Ahmad Firdausi, Putera, dan Yoserizal (2023) juga menemukan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah masih menghadapi kendala berupa rendahnya pengetahuan masyarakat, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta adanya alternatif perlindungan lain yang mengurangi minat masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Syahfitri, Ilham, Mulyati, dan Tjenreng (2024) dalam evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja melalui kebijakan yang inklusif dan implementatif. Di sisi lain, Suharman dan Pabisa (2023) menyoroti bahwa peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas tenaga kerja dan keberhasilan program ketenagakerjaan. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, kapasitas sumber daya, koordinasi antar lembaga, penerimaan masyarakat, serta dukungan pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu tentang BPJS Ketenagakerjaan yang umumnya berfokus pada tingkat kepesertaan, efektivitas program, atau kendala administratif di wilayah perkotaan dan sektor formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks objek penelitian, yaitu implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan

di Kabupaten Simeulue, sebuah wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang kompleks, dominasi pekerja sektor informal, serta tingkat cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih rendah. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun (2020) yang menekankan enam dimensi implementasi, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial, yang relatif belum banyak digunakan dalam kajian jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Dari sisi metodologis, penelitian ini juga menghadirkan kebaruan melalui penggunaan pendekatan kualitatif dengan Template Analysis berbantuan NVivo 12, sehingga mampu mengidentifikasi secara lebih sistematis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga menganalisis bagaimana kondisi geografis kepulauan, kapasitas kelembagaan, dan penerimaan sosial masyarakat memengaruhi implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivisme karena implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dapat dipahami melalui data empiris, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, kelembagaan, dan kondisi geografis Kabupaten Simeulue (Sugiyono, 2022). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan informan kunci berasal dari unsur BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simeulue, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki kewenangan, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan sehingga mampu memberikan informasi yang akurat terkait faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan (Sekaran & Bougie, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan Template Analysis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12, berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020), yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dengan fokus pada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simeulue sebagai aktor utama penyelenggaraan program. Pemilihan lokasi didasarkan pada rendahnya tingkat kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, dominasi pekerja sektor informal, serta karakteristik wilayah kepulauan yang memengaruhi implementasi kebijakan. Kegiatan penelitian berlangsung mengikuti kalender akademik IPDN Tahun Akademik 2025/2026, mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi pada rentang Agustus 2025 sampai Juni 2026 (Knill & Tosun, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan NVivo 12, diperoleh pemetaan tematik yang menunjukkan keterkaitan faktor-faktor dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. NVivo 12 digunakan untuk proses pengodean, pengelompokan data, dan penelusuran hubungan antar kategori temuan yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil tersebut diinterpretasikan menggunakan Template Analysis berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020). Dengan demikian, NVivo 12 membantu memperkuat analisis dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan secara sistematis dan komprehensif.

Gambar 1.

Concept Map Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Berdasarkan Dimensi Knill & Tosun (2020)

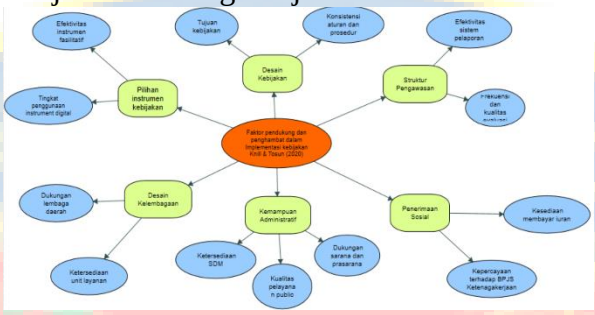

Sumber : Diolah oleh penulis Menggunakan Nvivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 1. concept map menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam dimensi utama, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Setiap dimensi dijabarkan ke dalam indikator seperti efektivitas instrumen fasilitatif, konsistensi aturan dan prosedur, efektivitas sistem pelaporan, dukungan lembaga daerah, ketersediaan SDM, kualitas pelayanan publik, kesediaan membayar iuran, dan kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Peta konsep ini menggambarkan bahwa keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan ditentukan oleh keterkaitan aspek kebijakan, kelembagaan, administrasi, pengawasan, dan penerimaan masyarakat.

Gambar 2.

Proses Input Sumber Data ke NVivo (Cases)

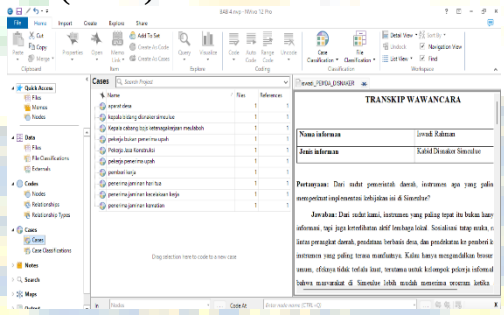

Sumber : *Diolah oleh penulis Menggunakan Nvivo 12, 2026*

Berdasarkan Gambar 2. ditampilkan proses input data yang telah dikumpulkan dan dikodekan berdasarkan atribut teori Knill dan Tosun. Data penelitian dimasukkan ke dalam NVivo dan diklasifikasikan dalam bentuk cases sesuai kategori informan. Cases meliputi aparat desa, Kabid Disnaker Simeulue, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh, pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pemberi kerja, dan penerima manfaat jaminan. Pengelompokan ini memudahkan proses pengodean, penelusuran pendapat antaraktor, dan analisis tematik secara sistematis serta terstruktur.

Gambar 3.

Pembuatan Nodes Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Knill & Tosun (2020)

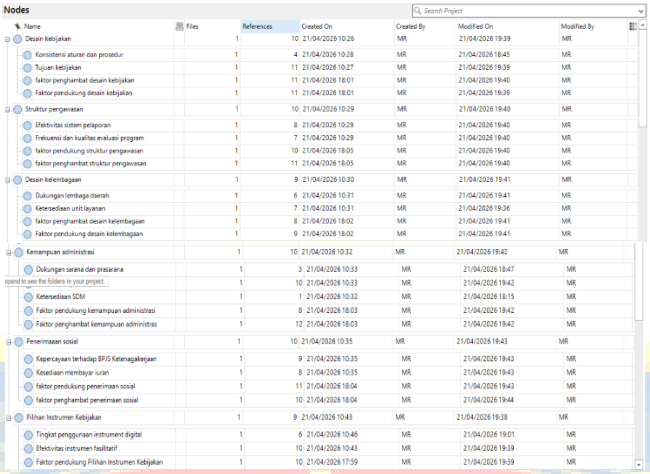

Sumber : Diolah oleh penulis Menggunakan Nvivo 12, 2026

Berdasarkan Gambar 3. struktur nodes dalam NVivo 12 disusun berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan, yaitu desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administrasi, penerimaan sosial, dan pilihan instrumen kebijakan. Setiap dimensi memiliki indikator seperti konsistensi aturan dan prosedur, tujuan kebijakan, efektivitas sistem pelaporan, evaluasi program, dukungan lembaga daerah, unit layanan, ketersediaan SDM, sarana prasarana, kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, kesediaan membayar iuran, serta penggunaan instrumen digital. Selain itu, terdapat node faktor pendukung dan faktor penghambat untuk mengidentifikasi kondisi yang memperkuat maupun menghambat implementasi kebijakan. Proses analisis dilakukan secara sistematis, hierarkis, dan terstruktur.

Gambar 4.

Word Cloud Penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue



Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12, 2026

Berdasarkan Gambar 4. pembahasan implementasi kebijakan banyak berpusat pada pekerja sebagai sasaran utama kebijakan. Kata-kata yang dominan antara lain program, petugas, masyarakat, perusahaan, layanan, sosialisasi, pengawasan, administrasi, pendukung, dan penghambat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh peran petugas, keterlibatan perusahaan, kemudahan layanan administrasi, dan efektivitas pengawasan. Selain itu, munculnya kata sosialisasi, informasi, percaya, keterbatasan, dan digital menunjukkan masih adanya kendala pemahaman masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Faktor pendukung berasal dari layanan, petugas, dan dukungan kelembagaan, sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan rendahnya pemahaman, keterbatasan sosialisasi, kendala administrasi, serta lemahnya kepatuhan perusahaan dan pekerja.

Gambar 5.
Word Tree dari Kata Pekerja

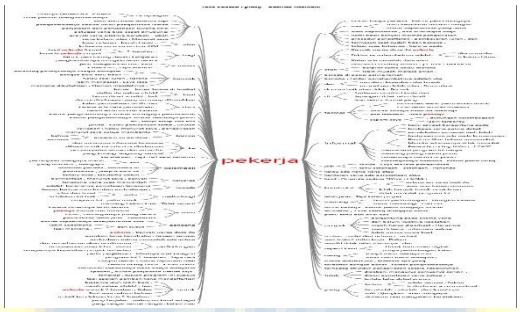

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12, 2026

Berdasarkan Gambar 5. kata "pekerja" menjadi tema utama dalam data wawancara yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpusat pada perlindungan pekerja formal maupun informal. Visualisasi ini menunjukkan faktor pendukung berupa manfaat perlindungan kerja, dukungan kelembagaan, layanan petugas, pendataan kepesertaan, dan prosedur yang lebih mudah. Namun, terdapat faktor penghambat seperti rendahnya pemahaman pekerja terhadap manfaat program, kurangnya sosialisasi langsung, keterbatasan pengawasan perusahaan, iuran yang dianggap berat, serta akses informasi dan layanan yang belum merata bagi pekerja informal, pekerja proyek, konstruksi, nelayan, dan petani. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan informasi, kepatuhan perusahaan, kapasitas petugas, serta kemampuan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjangkau seluruh kelompok pekerja secara berkelanjutan.

3.1 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh

3.1.1 Pilihan Instrumen Kebijakan

Dimensi pilihan instrumen kebijakan menjelaskan cara yang digunakan dalam implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menjangkau masyarakat, meliputi sosialisasi tatap muka, pendampingan, kerja sama dengan desa, peran perusahaan, dan penggunaan media digital. Dimensi ini penting karena keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh ketepatan instrumen yang sesuai dengan kondisi wilayah, karakter pekerjaan, dan tingkat pemahaman masyarakat. Pada konteks Simeulue yang berciri kepulauan dan memiliki kelompok pekerja yang beragam, instrumen yang tepat menentukan keberhasilan kebijakan diterima dan dijalankan oleh kelompok sasaran.

Gambar 6.
Word Cloud Dimensi Pilihan Instrumen Kebijakan



Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 6. dimensi pilihan instrumen kebijakan didominasi oleh kata perusahaan, masyarakat, pendampingan, sosialisasi, pendaftaran, administrasi, dan kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perusahaan, sosialisasi langsung, pendampingan, serta kemudahan administrasi menjadi instrumen utama dalam memperluas perlindungan pekerja dari risiko kerja.

Gambar 7.

Hierarchy Chart Dimensi Pilihan Instrumen Kebijakan

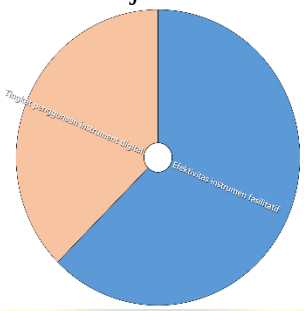

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 7. efektivitas instrumen fasilitatif lebih dominan dibanding penggunaan instrumen digital. Implementasi program lebih banyak bergantung pada sosialisasi langsung, pendampingan, bantuan pendaftaran, dan pelayanan administrasi, sedangkan instrumen digital masih berfungsi sebagai pendukung.

1. Efektivitas Instrumen Fasilitatif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa instrumen yang paling efektif adalah sosialisasi tatap muka, pendampingan, jemput bola, koordinasi dengan desa, dan peran perusahaan. Masyarakat lebih mudah menerima informasi melalui aparatur desa, tokoh lokal, maupun petugas yang memberikan penjelasan langsung. Sosialisasi langsung dinilai lebih efektif karena memungkinkan masyarakat memahami manfaat program dan bertanya secara langsung. Faktor pendukungnya adalah jaringan desa, peran perusahaan, dan kemauan petugas turun langsung. Adapun faktor penghambatnya berupa jarak wilayah, cuaca, keterbatasan waktu petugas, dan sulitnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara bersamaan.

Gambar 8.

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue kepada Masyarakat



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kab. Simeulue

Berdasarkan Gambar 8. kegiatan sosialisasi tatap muka menjadi bagian dari efektivitas instrumen fasilitatif karena petugas memberikan penjelasan langsung mengenai manfaat, iuran, kepesertaan, dan prosedur program. Pendekatan ini memudahkan masyarakat, terutama pekerja informal dan warga desa, dalam memahami program BPJS Ketenagakerjaan. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia dalam bentuk tertulis, peran petugas tetap penting untuk mendampingi peserta dalam memahami prosedur layanan.

2. Penggunaan Instrumen Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen digital telah digunakan melalui aplikasi JMO, portal layanan, QR code, dan layanan digital lainnya. Namun, instrumen digital belum dapat menjadi sarana utama karena masih terdapat kendala jaringan, literasi digital yang belum merata, dan kebiasaan masyarakat yang lebih mempercayai penjelasan langsung. Oleh karena itu, instrumen digital berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti sosialisasi tatap muka. Faktor pendukungnya adalah tersedianya aplikasi dan layanan digital, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan jaringan, rendahnya

literasi digital, dan preferensi masyarakat terhadap komunikasi langsung. Dimensi pilihan instrumen kebijakan dinilai cukup optimal, terutama pada efektivitas instrumen fasilitatif. Sosialisasi tatap muka, pendampingan, jemput bola, koordinasi desa, dan peran perusahaan terbukti lebih mudah diterima masyarakat. Sementara itu, penggunaan instrumen digital belum optimal karena masih menghadapi kendala teknis dan sosial, sehingga berfungsi sebagai instrumen pendukung.

3.1.2 Desain Kebijakan

Dimensi desain kebijakan digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dirumuskan dari sisi tujuan, isi perlindungan, aturan, dan prosedur pelaksanaannya. Dalam konteks Simeulue, desain kebijakan tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari tingkat keterpahaman bagi pekerja formal, pekerja informal, pemberi kerja, dan masyarakat sebagai sasaran perlindungan.

Gambar 9.
Word Cloud Dimensi Desain Kebijakan

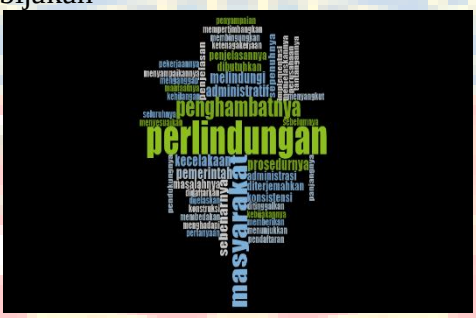

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 9. kata yang dominan adalah perlindungan, masyarakat, administratif, prosedurnya, dan penghambatnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan telah dipahami sebagai upaya perlindungan tenaga kerja, namun prosedur dan aspek administratif masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Gambar 10.
Hierarchy Chart Desain Kebijakan

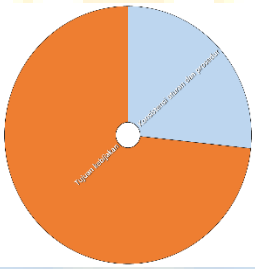

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 10. indikator tujuan kebijakan lebih dominan dibanding indikator konsistensi aturan dan prosedur. Informan umumnya memahami tujuan program untuk melindungi pekerja dari risiko kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan penghasilan. Namun, prosedur pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim masih dianggap rumit, terutama oleh pekerja informal dan masyarakat desa.

1. Tujuan Kebijakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan kebijakan dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Pemerintah daerah dan masyarakat menilai tujuan tersebut relevan dengan kebutuhan daerah karena mendukung perlindungan tenaga kerja dan ketahanan ekonomi keluarga. Namun, sebagian pekerja informal masih memandang program hanya sebagai iuran bulanan, bukan perlindungan jangka panjang.

Faktor pendukung indikator ini adalah kejelasan tujuan, luasnya cakupan perlindungan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan pekerja.

Tabel 1.
Klaim Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Simeulue Tahun 2025

No	Program	Kasus	Nominal
1	Jaminan Hari Tua (JHT)	226	2.080.605.350
2	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	65	184.331.290
3	Jaminan Kematian (JKM)	17	560.000.000
4	Jaminan Pensiunan (JP)	3	33.167.120
5	Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)	6	56.000.000
	Jumlah	**317**	**2.914.103.760**

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, 2025

Berdasarkan Tabel 1. jumlah klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025 mencapai 317 kasus dengan total nominal Rp2.914.103.760. Klaim terbesar berasal dari Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 226 kasus senilai Rp2.080.605.350, sedangkan klaim paling sedikit terdapat pada Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 3 kasus senilai Rp33.167.120. Data ini menunjukkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan manfaat nyata bagi pekerja di Kabupaten Simeulue melalui perlindungan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

2. Konsistensi Aturan dan Prosedur

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aturan dan prosedur telah tersedia, namun belum sepenuhnya mudah dipahami masyarakat. Masyarakat masih mengalami kesulitan memahami istilah administratif, prosedur pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim. Hambatan utama bukan terletak pada penolakan terhadap program, tetapi pada penggunaan bahasa yang terlalu teknis dan panjang. Faktor pendukung indikator ini adalah adanya dasar hukum yang jelas, alur layanan yang tersedia, dan pembagian program yang rinci. Sementara itu, faktor penghambatnya berupa bahasa kebijakan yang formal, banyaknya tahapan administratif, dan rendahnya pemahaman pekerja informal terhadap prosedur program. Dimensi desain kebijakan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan relevan untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja dan sosial. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena prosedur dan bahasa kebijakan masih bersifat administratif dan belum mudah dipahami masyarakat. Faktor pendukung terletak pada kejelasan tujuan dan kelengkapan program, sedangkan faktor penghambat berada pada kompleksitas prosedur dan kesenjangan pemahaman masyarakat.

3.1.3 Struktur Pengawasan

Dimensi struktur pengawasan digunakan untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dipantau melalui sistem pelaporan, verifikasi data, pembaruan status kepesertaan, dan evaluasi program. Dimensi ini penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai tujuan, data peserta tetap akurat, dan keberlanjutan kepesertaan dapat dipantau dengan baik. Pada Kabupaten Simeulue, pengawasan juga berkaitan dengan perbedaan karakter sektor formal dan informal.

Gambar 11.
Word Cloud Dimensi Struktur Pengawasan



Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 11. dimensi struktur pengawasan didominasi oleh kata pengawasan, administratif, kepesertaan, pelaporan, konsistensi, dan penghambatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan lebih banyak dilakukan melalui mekanisme administratif yang berkaitan dengan status kepesertaan, kelengkapan dokumen, dan pelaporan. Sistem pengawasan sudah tersedia, tetapi masih perlu diperkuat agar tidak hanya berfokus pada administrasi, melainkan juga pengawasan yang lebih substantif.

Gambar 12.

Hierarchy Chart Struktur Pengawasan

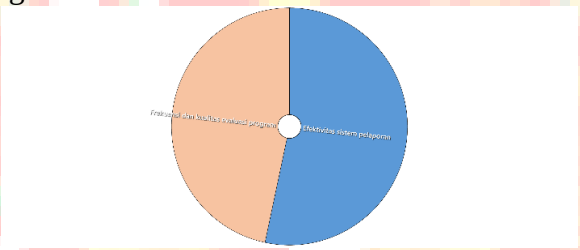

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 12. indikator efektivitas sistem pelaporan lebih dominan dibanding frekuensi dan kualitas evaluasi program. Pelaporan administratif sudah berjalan, terutama pada sektor formal melalui data perusahaan, status kepesertaan, dan data klaim. Namun, evaluasi program belum optimal karena masih berfokus pada jumlah peserta dan klaim, serta belum mendalami penyebab peserta nonaktif, rendahnya kepatuhan, dan sulitnya menjangkau pekerja informal.

1. Efektivitas Sistem Pelaporan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pelaporan administratif sudah berjalan, terutama pada sektor formal melalui data kepesertaan, data klaim, data perusahaan, dan status peserta aktif. Namun, pada sektor informal, pengawasan masih bergantung pada pendataan lapangan, kerja sama desa, dan kesadaran peserta. Faktor pendukung indikator ini adalah tersedianya sistem data, status kepesertaan, dan mekanisme verifikasi. Adapun faktor penghambatnya ialah perubahan data yang cepat pada sektor informal, keterbatasan pendataan lapangan, dan lemahnya keterhubungan data dengan pengawasan desa.

Tabel 2.

Rekap Perubahan Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue
Juli 2025 – Januari 2026

No	Segmen	Desember 2025	Januari 2026	Perubahan	Keterangan
1	PU	4.261	4.261	0	Stabil
2	BPU	2.032	2.041	+9	Meningkat
3	Jasa Konstruksi	135	134	-1	Menurun tipis
	Total	**6.428**	**6.436**	**+8**	**Naik tipis**

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, 2026

Berdasarkan Tabel 2. jumlah peserta aktif meningkat tipis dari 6.428 menjadi 6.436 peserta. Kenaikan terjadi pada segmen BPU dari 2.032 menjadi 2.041 peserta, sedangkan PU tetap 4.261 peserta

dan Jasa Konstruksi turun dari 135 menjadi 134 peserta. Data ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan telah mampu memantau perkembangan kepesertaan secara berkala, namun masih perlu diperkuat agar menjadi dasar pengawasan dan tindak lanjut di lapangan.

2. Frekuensi dan Kualitas Evaluasi Program

Evaluasi program telah dilakukan, tetapi belum selalu mendalam. Evaluasi masih banyak berfokus pada jumlah peserta aktif, jumlah klaim, dan jumlah perusahaan, sementara penyebab peserta nonaktif, kelompok pekerja yang sulit dijangkau, dan ketidakstabilan kepatuhan belum dianalisis secara optimal. Desa juga belum dilibatkan secara rutin dalam evaluasi yang sistematis. Faktor pendukung indikator ini adalah adanya komitmen koordinasi dan sistem data dasar. Sementara faktor penghambatnya ialah belum meratanya evaluasi berkala, belum optimalnya pelibatan desa, dan lemahnya tindak lanjut terhadap peserta nonaktif maupun kelompok yang belum terjangkau.

Dimensi struktur pengawasan menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan pengawasan sudah tersedia, terutama secara administratif. Namun efektivitasnya belum merata, khususnya pada sektor informal. Faktor pendukungnya adalah tersedianya data dan mekanisme verifikasi, sedangkan faktor penghambatnya ialah lemahnya pembaruan data lapangan, keterbatasan evaluasi substantif, dan belum optimalnya pelibatan desa dalam pemantauan kepesertaan. Dengan demikian, struktur pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih lemah pada tindak lanjut lapangan.

3.1.4 Desain Kelembagaan

Dimensi desain kelembagaan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan didukung oleh susunan aktor, pembagian peran, hubungan kerja antar lembaga, dan ketersediaan saluran layanan. Dimensi ini mencakup BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, Disnaker, desa, perusahaan, serta berbagai kanal layanan yang digunakan untuk menjangkau masyarakat.

Gambar 13.
Word Cloud Dimensi Desain Kelembagaan



Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 13. dimensi desain kelembagaan didominasi oleh kata layanan, dukungan, lembaga, koordinasi, pemerintah, petugas, masyarakat, dan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada akses layanan serta kerja sama antara BPJS, Disnaker, pemerintah daerah, desa, perusahaan, dan petugas lapangan. Dukungan kelembagaan sudah tersedia, tetapi masih perlu diperkuat pada pemerataan layanan dan koordinasi.

Gambar 14.
Hierarchy Chart Desain Kelembagaan

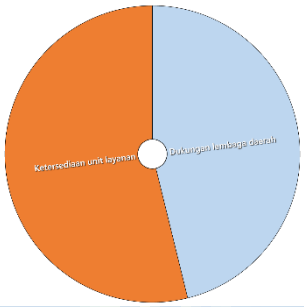

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 14. indikator ketersediaan unit layanan sedikit lebih dominan dibanding dukungan lembaga daerah. Hal ini menunjukkan bahwa selain dukungan antar lembaga, kemudahan akses layanan menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Desain kelembagaan telah didukung kerja sama lintas lembaga, tetapi masih perlu diperkuat pada pemerataan akses layanan bagi pekerja di wilayah jauh dan sektor informal.

1. Dukungan Lembaga Daerah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi program sangat bergantung pada kerja sama BPJS, pemerintah daerah, Disnaker, kecamatan, desa, dan pemberi kerja. Dukungan kelembagaan telah tersedia melalui koordinasi kebijakan, forum lintas sektor, dan kerja sama dengan BPJS. Namun, peran setiap lembaga belum sama kuatnya di semua wilayah. Faktor pendukung indikator ini adalah adanya jejaring antar lembaga dan saluran komunikasi yang beragam. Adapun faktor penghambatnya ialah belum meratanya peran lembaga, belum konsistennya koordinasi lapangan, dan masih adanya wilayah yang menunggu inisiatif pihak lain. Terdapat penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dokumentasi ini menunjukkan adanya dukungan formal dari pemerintah daerah melalui koordinasi dan fasilitasi program, sehingga implementasi kebijakan tidak hanya dijalankan oleh BPJS tetapi juga didukung oleh pemerintah daerah dan dinas terkait.

2. Ketersediaan Unit Layanan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa unit layanan telah tersedia, namun persoalan utama terletak pada aksesibilitas. Ketersediaan layanan tidak hanya diukur dari keberadaan kantor, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan. Masyarakat yang tinggal jauh dari titik layanan masih menghadapi hambatan fisik dan administratif. Faktor pendukungnya adalah tersedianya berbagai kanal layanan dan jejaring kelembagaan. Sementara faktor penghambatnya ialah kondisi geografis, keterbatasan titik layanan yang dekat dengan masyarakat, dan belum meratanya akses layanan di tingkat lokal.

Dimensi desain kelembagaan dapat dinilai cukup optimal, terutama pada indikator dukungan lembaga daerah. BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, Disnaker, desa, dan perusahaan telah berperan dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, indikator ketersediaan unit layanan belum optimal karena akses layanan belum merata bagi masyarakat yang tinggal jauh dari titik layanan dan menghadapi hambatan geografis. Dengan demikian, dukungan kelembagaan sudah terbentuk, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada pemerataan akses layanan dan konsistensi koordinasi lintas pihak.

3.1.5 Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif digunakan untuk menilai kapasitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan dari sisi SDM, kualitas pelayanan, serta dukungan sarana dan

prasarana. Dalam konteks Kabupaten Simeulue, kemampuan administratif juga berkaitan dengan kemampuan pelaksana menyesuaikan diri terhadap kondisi wilayah dan karakter peserta yang beragam.

Gambar 15.

Word Cloud Dimensi Kemampuan Administratif



Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 15. dimensi kemampuan administratif didominasi oleh kata administratif, menjelaskan, administrasi, pengalaman, perusahaan, dan penghambatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan administratif tidak hanya berkaitan dengan ketertiban dokumen dan prosedur, tetapi juga kemampuan petugas dalam menjelaskan program kepada masyarakat. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan personel, masalah sistem, dan kesiapan dokumen peserta.

Gambar 16.

Hierarchy Chart Kemampuan Administratif

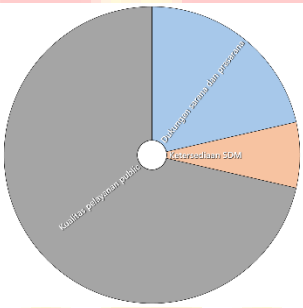

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 16. indikator kualitas pelayanan publik menjadi yang paling dominan, diikuti dukungan sarana dan prasarana, sedangkan ketersediaan SDM memiliki porsi paling kecil. Pelayanan dinilai cukup baik karena petugas mampu memberikan penjelasan yang jelas dan responsif. Namun, pelayanan masih terkendala oleh keterbatasan SDM, sistem yang lambat, jaringan internet, dan kelengkapan dokumen peserta.

1. Ketersediaan SDM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas memiliki komitmen tinggi, tetapi menghadapi beban kerja yang besar. Petugas tidak hanya harus memahami aturan dan sistem, tetapi juga menjelaskan program kepada masyarakat serta menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah. Faktor pendukung indikator ini adalah komitmen petugas, pengalaman kerja, dan kemampuan adaptasi pelayanan. Adapun faktor penghambatnya ialah keterbatasan jumlah personel, intensitas pelayanan yang belum ideal untuk wilayah kepulauan, serta beban kerja yang menuntut kemampuan teknis dan komunikasi sekaligus.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan dinilai dari kejelasan informasi, kecepatan proses, sikap petugas, dan empati terhadap peserta. Peserta merasa lebih terbantu ketika petugas menjelaskan prosedur dengan sabar dan mudah dipahami. Pelayanan yang baik tidak hanya cepat, tetapi juga jelas dan tidak mempersulit peserta dalam mengurus administrasi program. Faktor pendukungnya ialah petugas yang komunikatif, alur

layanan yang mulai tertata, dan dukungan informasi tertulis. Sedangkan faktor penghambatnya adalah proses yang masih panjang ketika dokumen belum lengkap, sistem yang lambat, dan kebutuhan pendampingan yang tinggi.

Tabel 3.

Data Kunjungan Layanan Peserta per Bulan Tahun 2025

No.	Bulan	Pembaruan Data	Konsultasi/Pengaduan
1	Juli (2025)	28	35
2	Agustus (2025)	24	31
3	September (2025)	30	40
4	Oktober(2025)	22	29
5	November (2025)	33	44
6	Desember (2025)	29	38
Jumlah		166	217

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Tabel 3. selama Juli–Desember 2025 tercatat 166 kunjungan pembaruan data dan 217 konsultasi/pengaduan. Jumlah konsultasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan peserta tidak hanya terkait administrasi, tetapi juga kebutuhan informasi dan penyelesaian masalah. Data ini menegaskan bahwa kemampuan administratif harus mencakup pengelolaan administrasi sekaligus pelayanan yang jelas, cepat, dan responsif.

3. Dukungan Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sangat memengaruhi mutu pelayanan. Pelayanan sering terkendala oleh sistem yang lambat, akses internet yang bermasalah, dokumen yang tidak lengkap, dan jarak layanan yang jauh. Meskipun berbagai sarana layanan telah tersedia, efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan teknis dan kemampuan peserta dalam memanfaatkan layanan tersebut. Faktor pendukungnya ialah tersedianya aplikasi, portal layanan, kantor pelayanan, dan informasi tertulis. Faktor penghambatnya ialah gangguan sistem, keterbatasan internet, dokumen yang tidak lengkap, dan kemampuan peserta yang berbeda-beda dalam memenuhi persyaratan.

Tabel 4.

Data Dukungan Sarana dan Prasarana BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue

No	Sarana/Prasarana	Fungsi dalam Pelayanan	Keterangan
1	Portal layanan online BPJS Ketenagakerjaan	Mengakses informasi program, kepesertaan, dan klaim.	Sudah tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada jaringan internet.
2	Aplikasi JMO	Mengecek saldo, informasi kepesertaan, dan layanan digital tertentu.	Membantu peserta yang paham teknologi, tetapi belum semua masyarakat mampu menggunakannya.
3	QR Code dan kanal informasi digital	Memudahkan peserta mengakses informasi layanan.	Berguna sebagai alat bantu, tetapi tetap memerlukan penjelasan langsung.
4	Verifikasi online/video call	Mendukung proses layanan dan klaim secara daring.	Dapat mempercepat layanan, tetapi membutuhkan koneksi internet yang stabil.
5	Brosur dan alur layanan tertulis	Menjelaskan langkah pendaftaran, pembayaran, dan klaim.	Membantu pemahaman awal, tetapi bahasa teknis masih perlu didampingi petugas.
6	Akses kantor/titik layanan	Menjadi tempat pelayanan administrasi langsung bagi peserta.	Penting bagi peserta yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
7	Dokumen persyaratan peserta	Menjadi dasar verifikasi administrasi dan klaim.	Sering menjadi hambatan apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sinkron.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4. BPJS Ketenagakerjaan telah didukung oleh portal layanan online, aplikasi JMO, QR code, verifikasi daring, brosur layanan, akses kantor, dan dokumen administrasi. Sarana tersebut menunjukkan bahwa pelayanan telah didukung perangkat digital dan informasi tertulis. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh stabilitas internet, kelancaran sistem, kelengkapan dokumen, dan kemampuan peserta menggunakan layanan digital. Dimensi kemampuan administratif menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh komitmen petugas dan alur layanan yang cukup tertata. Faktor pendukung utamanya adalah petugas yang komunikatif, pengalaman pelayanan, dan tersedianya sarana pendukung. Namun, efektivitasnya masih terganggu oleh keterbatasan SDM, sistem yang lambat, internet yang tidak stabil, dan dokumen peserta yang belum lengkap. Dengan demikian, kemampuan administratif dapat dinilai cukup optimal pada kualitas pelayanan publik, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek SDM serta sarana dan prasarana.

3.1.6 Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat menerima dan merespons kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dari sisi kepercayaan terhadap program dan kesediaan membayar iuran. Dalam konteks Kabupaten Simeulue, penerimaan sosial dipengaruhi oleh pengalaman manfaat program dan kondisi ekonomi masyarakat.

Gambar 17.

Word Cloud Dimensi Penerimaan Sosial



Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 17. dimensi penerimaan sosial didominasi oleh kata penerimaan, kepercayaan, masyarakat, pengalaman, manfaatnya, dan penghasilannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh manfaat nyata yang dirasakan serta pengalaman langsung terhadap program. Namun, kondisi ekonomi tetap menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan kepesertaan, terutama bagi pekerja informal.

Gambar 18.

Hierarchy Chart Dimensi Sosial

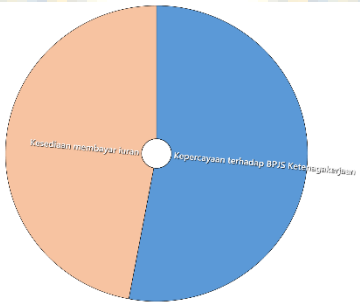

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 (2026)

Berdasarkan Gambar 18. indikator kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan lebih dominan dibanding kesediaan membayar iuran. Masyarakat mulai percaya karena telah melihat manfaat program

melalui klaim JHT, JKK, dan JKM. Namun, kesediaan membayar iuran masih rendah, terutama pada pekerja informal, nelayan, buruh harian, dan pekerja musiman yang memiliki pendapatan tidak tetap.

1. Kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat tumbuh melalui pengalaman manfaat yang nyata, seperti klaim JKM, JKK, dan JHT yang diterima peserta atau ahli waris. Kepercayaan meningkat ketika masyarakat melihat langsung manfaat program di lingkungan sekitarnya. Faktor pendukung indikator ini ialah pengalaman manfaat nyata, contoh keberhasilan klaim, dan penyampaian manfaat program yang jelas. Sedangkan faktor penghambatnya ialah masyarakat yang belum pernah melihat manfaat langsung, keraguan terhadap program, dan rendahnya literasi tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 5.

Rasio Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue Tahun 2025

No.	Program	Jumlah Klaim	Persentase Kasus	Nominal Klaim	Persentase Nominal
1.	JHT	226	71,29%	Rp2.080.605.350	71,40%
2.	JKK	65	20,50%	Rp184.331.290	6,33%
3.	JKM	17	5,36%	Rp560.000.000	19,22%
4.	JP	3	0,95%	Rp33.167.120	1,14%
5.	JKP	6	1,89%	Rp56.000.000	1,92%
	Total	**317**	**100%**	**Rp2.914.103.760**	**100%**

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 5. terdapat 317 klaim manfaat dengan total nominal Rp2.914.103.760 yang tersebar pada program JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP. Data ini menunjukkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan manfaat nyata bagi peserta dan keluarganya, sehingga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program.

2. Kesediaan Membayar Iuran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja formal lebih mudah membayar iuran karena mekanismenya ditangani perusahaan. Sebaliknya, pekerja informal sering mengalami kesulitan membayar iuran secara konsisten karena pendapatan yang tidak tetap. Hambatan utama bukan pada penolakan terhadap program, melainkan pada kemampuan ekonomi dan prioritas kebutuhan sehari-hari. Faktor pendukung indikator ini adalah manfaat program yang jelas, sistem pemotongan iuran pada sektor formal, dan informasi iuran yang tersedia. Sedangkan faktor penghambatnya ialah pendapatan yang tidak stabil, kebutuhan ekonomi harian, dan pandangan sebagian pelaku usaha bahwa iuran merupakan tambahan beban biaya.

Tabel 6.

Cakupan dan Jumlah Pekerja Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue Tahun 2025

No.	Segmen	Tenaga Kerja 2025	Peserta Aktif 2025	Belum Terlindungi	Coverage
1.	PU	9.634	4.497	5.137	46,68%
2.	BPU	14.431	1.756	12.675	12,25%
3.	Jasa Konstruksi	2.683	106	2.577	3,95%
	Total	**26.748**	**6.359**	**20.389**	**23,86%**

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue, 2025.

Berdasarkan Tabel 6. dari total 26.748 tenaga kerja, hanya 6.359 peserta yang aktif atau sebesar 23,86%, sedangkan 20.389 pekerja belum terlindungi. Cakupan tertinggi terdapat pada pekerja penerima upah (46,68%), sedangkan pekerja bukan penerima upah hanya 12,25% dan jasa konstruksi

3,95%. Data ini menunjukkan bahwa rendahnya kepesertaan lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi dan keberlanjutan pembayaran iuran dibanding penolakan terhadap program.

Dimensi penerimaan sosial menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerima program BPJS Ketenagakerjaan karena manfaatnya telah dirasakan secara nyata. Faktor pendukungnya adalah pengalaman manfaat, keberhasilan klaim, dan pelayanan yang meyakinkan. Namun, faktor penghambat utama adalah ketidakstabilan penghasilan, rendahnya literasi program, dan kesulitan membayar iuran secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerimaan sosial dapat dinilai cukup optimal pada indikator kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, tetapi belum optimal pada indikator kesediaan membayar iuran.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue belum berjalan secara optimal. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan didukung oleh komitmen petugas BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi tatap muka yang intensif, koordinasi lintas lembaga, dukungan pemerintah daerah, serta adanya bukti nyata manfaat klaim yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, hambatan utama yang ditemukan meliputi kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan akses layanan, keterbatasan pemanfaatan instrumen digital, rendahnya pemahaman pekerja informal terhadap prosedur administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kemampuan ekonomi peserta yang belum stabil dalam membayar iuran secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Afmi Apriliani dan Venni Alfrianni Bawamenewi (2024) yang menemukan bahwa kurangnya pemahaman peserta mengenai prosedur dan persyaratan administrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Elvi Nuari Hutahaean (2023) yang menyimpulkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Berbeda dengan temuan Wenny Hazminovia Siregar dan Rudi Kristian (2023) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kota Medan terkendala oleh rendahnya kepatuhan peserta meskipun wilayah penelitian memiliki akses layanan yang relatif mudah, penelitian ini menemukan bahwa faktor geografis kepulauan menjadi hambatan yang lebih dominan dibandingkan faktor kepatuhan administratif. Karakteristik Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan menyebabkan proses sosialisasi, pengawasan, dan pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kekuatan lokal berupa keterlibatan pemerintah desa, strategi jemput bola, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat yang terbukti efektif meningkatkan penerimaan sosial terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, kolaborasi antaraktor, dan kedekatan pelayanan dengan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan di Kabupaten Simeulue perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas administrasi, perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil, serta pengembangan mekanisme pembayaran iuran yang lebih fleksibel bagi pekerja sektor informal.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa salah satu temuan menarik dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue adalah adanya kontradiksi

antara tingginya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat program dengan masih rendahnya tingkat kepesertaan aktif, khususnya pada pekerja sektor informal. Faktor pendukung utama berasal dari komitmen petugas lapangan, efektivitas sosialisasi tatap muka, koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta pengalaman nyata peserta dalam menerima manfaat klaim yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan akses layanan, keterbatasan jaringan internet dan instrumen digital, rendahnya literasi masyarakat mengenai program, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pelayanan, serta kemampuan ekonomi pekerja informal yang belum stabil untuk membayar iuran secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi dan karakteristik wilayah setempat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh belum berjalan optimal, meskipun didukung oleh komitmen petugas, sosialisasi tatap muka yang efektif, koordinasi antarinstansi, dukungan pemerintah daerah, serta manfaat program yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan berupa kondisi geografis kepulauan, keterbatasan pemanfaatan instrumen digital, rendahnya pemahaman pekerja informal terhadap prosedur administrasi, lemahnya pengawasan dan evaluasi lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pelayanan, serta rendahnya kemampuan pekerja informal dalam membayar iuran secara berkelanjutan. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui penerbitan regulasi daerah, penandatanganan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait, strategi jemput bola kepada pekerja informal, pendampingan kepada pemberi kerja, serta monitoring dan evaluasi kepesertaan secara berkala.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian berfokus pada analisis implementasi kebijakan berdasarkan perspektif informan dan kondisi pada periode penelitian tertentu.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada wilayah kepulauan atau daerah lain sebagai studi perbandingan implementasi BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan, kepesertaan pekerja informal, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simeulue, serta seluruh informan dan pihak terkait yang telah memberikan izin, data, dukungan, dan bantuan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, dan semua pihak yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, A., & Bawamenewi, V. A. 2024. Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karimah Tauhid, 3(2), 1303–1314. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11554

Barr, N., & Diamond, P. (2009). Reforming pensions: Principles and policy choices. International Social Security Review, 62(2), 5–29. https://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2009.01327.x

Firdausi, F. A., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. 2023. Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Padang. Journal of Social and Policy Issues, 4, 183–191. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.212

Fitriati, R., Rahmayanti, K. P., & Salomo, R. V. (2012). Critical review of triple helix to quanto-tuple helix: Lesson learned from social security system act implementation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 52, 217–225. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.458

Gatinangsih, MT. (2017). Kependudukan dan ketenagakerjaan: Modul mata kuliah (Gatinangsih, M.T., penyusun). Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=27383

Hutahaean, E. N. 2023. Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari. Universitas Dharmawangsa, 17(April), 709–717.

Lelono, J., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit DaerAH dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan). Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 5(1), 45–59. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/3118

Meilarovasari, A., Miarsa, F. R. D., & Yahya, D. (2025). Legal protection of social security BPJS employment for informal workers. Journal of Law, Politic and Humanities, 5(5). https://dinastires.org/JLPH/article/view/1911

Nuurjannah, N. Y. (2021). Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah (JAPD). https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2246

Pristanti, N., Sukidin, S., & Hartanto, W. 2022. Analisis Pola Kemitraan dalam Implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal. Jurnal Pendidikan Ekonomi. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3146623

Putra Prihananto, D. 2024. Analysis Of The Implementation Of Law N0. 24 Year 2011 Concerning BPJS Employment In Protecting Workers In Indonesia. International Journal of Law, 1(4), 69–83. https://international.appihi.or.id/index.php/IJLCJ/article/view/265

Putra, R., Putra, N. R., Putra, C. C. D. P., Putra, B. C. K., & Putra, A. N. A. 2025. Peran Program Jaminan Sosial Sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Indonesia Berdasaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Journal of Industrial Relations Studies, 1(2), 102–116. https://doi.org/10.37366/jirs.v1i2.5741

Sekaran, U., & Bougie, R. 2020. Research Methods for Business: A Skill Building Approach (8th ed.).

Siregar, W. H., & Kristian, R. 2023. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Dalam Meningkatkan Jaminan Sosial Di Pasar Sambas Kota Medan. Journal of Science and Social Research, 6(1), 269. https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1208

Sparrow, R., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2013). Social health insurance for the poor: Targeting and impact of Indonesia's Askeskin programme. Social Science & Medicine, 96, 264–271. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.09.043

Sugiyono. 2022. Metode P. In penerbit alfabeta bandung.

Suharman, F. S., & Pabisa, D. (2023). Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Domestik Melalui Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau. Jurnal Konstituen. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/3803

Syahfitri, C. N., Ilham, M., Mulyati, D., & Tjenreng, M. Z. B. (2024). Evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 14(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/4065

Tosun, K. 2020. Public Policy: A New Introduction.

Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. 2024. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. Jurnal Ilmiah Global Education, 5(2), 789–802. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619

Utama, P. N. (2023). Gambaran pelayanan bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial (Studi pada program pelayanan BPJS gratis di Dinas Sosial Kota Mataram). Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JPKP), 5(2), 72–90. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/3358

Van Ginneken, W. (2013). Extending social security coverage: Concepts, global trends and policy issues. International Social Security Review, 66(2), 67–93. https://doi.org/10.1111/issr.12010

Yusuf, S., Achmar, N., Haniarti, H., Majid, M., Aswad, M., & Esa, T. (2020). Revenue and financing of patients with national health insurance by the social security organizing agency to improve health services. Enfermería Clínica, 30(Suppl. 6), 276–279. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.11.071